

PEREMPUAN PILAR PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh : Angelina Sondakh, SE

Anggota DPR-RI Komisi X, Fraksi Partai Demokrat

Perempuan identik dengan masalah domestik ; melahirkan, menyusui, membesarkan anak hingga melayani suami dengan baik. Karena itu tidak salah kokoh-tidaknya pilar rumah tangga sangat bergantung pada pola didik serta asuh seorang ibu (perempuan). Tidak salah pula kalau generasi masa depan bangsa yang berkualitas sangat ditentukan oleh berjuta bahkan beratus juta perempuan terampil dan kokoh. Mereka inilah pilar-pilar pembangunan. Karena itu posisi signifikan mereka yang di 'kodrati' (melahirkan, menyusui, membesarkan anak hingga melayani suami) dalam rumah tangga (domestik) merupakan pekerjaan berat.

Mempersiapkan generasi unggul dalam moral dan maupun dalam prestasi selalu di persiapkan dari kondusifnya rumah tangga. Ibu yang rutin dengan aktifitas kodrati itu, juga merupakan subjek yang paling akrab dengan pertumbuhan maupun perkembangan keluarga. Dengan anak, itulah yang paling banyak waktu luangnya berinteraksi dengan anak. Tidak salah mereka yang paling banyak berinteraksi dengan anak, merekalah yang paling tahu dengan perkembangan psikologi seorang anak. Jadi, tidak berlebihan bila anak-anak yang akan menjadi pilar-pilar masa depan bangsa sangat bergantung pada seorang ibu (juga ayah). *Dus*, rapuh dan rentannya perempuan sangat mungkin juga membuat rapuhnya generasi yang kita lahirkan kemudian.

Bisa jadi, korban narkoba dan seks bebas yang tinggi dalam trend generasi kita di era global sekarang dapat kita redam dengan pilar-pilar rumah tangga yang kuat. Sayang perempuan sebagai pilar-pilar pembangunan bangsa kita yang kokoh dan kuat itu, ibarat pepatah, masih jauh api dari panggangnya. Kemiskinan, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi ternyata dalam angka yang tertinggi dirasakan kaum perempuan di Indonesia. Karena itu, era demokratisasi yang menggema kuat menuntut kesetaraan gender dan stop *trafficking* pada perempuan, serta politik formalitas yang sarat patriarkhi yang merugikan perempuan harus segera di hentikan. Pasalnya cara-cara tidak sehat itu hanya melahirkan bangsa ini jauh dari tujuan menjadi negara modern yang di impikan *founding father* dan *mother* yang bercita-cita kemerdekaan yang diperoleh merupakan kemerdekaan semua warga negara tanpa perbedaan etnis, agama maupun jenis kelamin. Jadi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengisi pembangunan, menuju masyarakat adil, makmur, dan sentosa.

MUSUH DEMOKRASI : KEMISKINAN, DISKRIMINASI DAN KEKERASAN

Demokratisasi yang kita laksanakan sekarang, lahir karena system otoritarian yang berjalan selama puluhan tahun hanya menguntungkan segelintir orang secara terus menerus, sementara dalam jumlah yang begitu banyak, rakyat kecil hidup dalam kemiskinan, diskriminasi dan kekerasan secara sistematis dan bersifat struktural. Kasus kematian tingginya angka kematian ibu-ibu di desa akibat kebijakan pemerintah dalam revolusi hijau (modernisasi pertanian) dalam penggunaan pupuk pestisida, yang mengandung zat kimia misalnya. Ditemukan ibu-ibu petani banyak yang meninggal karena penyakit kanker rahim, akibat hasil tanaman mereka yang mengandung racun (zat kimia). Disamping itu, system pertanian organik dengan menanam bibit sendiri serta membuat pupuk sendiri yang dilakukan ibu-ibu petani, dengan menanam tanaman dipekarangan sebagai kebiasaan yang mampu memberi nilai tambah buat membiayai pendidikan anak yang berjumlah 100 ribu sebulan, justru dimatikan dengan kebijakan revolusi hijau. Akibatnya pendapatan ibu-ibu petani yang diperoleh dari tanaman cabai, dan jenis sayuran di pekarangan yang bisa dijual di pasar, yang sudah menjadi tradisi ibu-ibu petani hilang karena kebijakan struktural tersebut. Akibat dari kebijakan struktural (pemerintah) yang berniat memodernisasi pertanian itu, justru yang terjadi sebaliknya ibu-ibu petani itu malah menjadi korban modernisasi. Alhasil, modernisasi yang belum waktunya itu, malah menciptakan kemiskinan baru pada ribuan bahkan jutaan ibu-ibu di desa. Hal yang tak kalah akut terdapat di kota juga. Di kota kemiskinannya lebih majemuk, rata-rata mereka yang dikota adalah orang-orang urban, kemiskinannya tidak pangan dan sandang saja, tapi juga identitas (tidak memiliki KTP), kemiskinan informasi, akses, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan semua perempuan di Indonesia adalah miskin, yang bukan saja ekonomi, tetapi juga dalam tingkatan informasi, pendidikan, bahkan partisipasi. (*Perempuan Miskin ; Dari Desa ke Kota (Jurnal Perempuan, vol. 42. 2005)*).

Sementara perjuangan tentang penghapusan diskriminasi gender, yang dilakukan aktifis perempuan belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Isu ini masih harus lebih keras lagi di perjuangkan, mengingat gaung CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) belum secara serius di implementasikan lewat UU No. 7 tahun 1984. CEDAW sendiri dalam telinga masyarakat masih sangat asing. Padahal lembaga internasional ini berdiri sudah puluhan tahun, dan kurang lebih 26 tahun silam Indonesia sebagai salah satu negara ikut meratifikasi CEDAW di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Alih-alih budaya dan konservatisme agama yang kuat di Indonesia, sangat menyulitkan diskriminasi bisa dihilangkan dengan cepat. Posisi laki-laki

lebih tinggi dari perempuan, merupakan konstruksi budaya yang telah tertanam kuat dalam masyarakat kita. Pada saat yang sama, kelemahan perempuan sebagai masyarakat nomor dua, juga menjadi konstruksi yang sulit dihilangkan dari kognisi masyarakat. Karena itu, UU Perkawinan tahun 1974 yang menyebut ; laki-laki mencari nafkah, perempuan mengurus rumah tangga, dianggap menyalahi konsep kesetaraan gender. *(Pengawal Keadilan Melalui Konvensi [hal 146] ; Jurnal Perempuan NO. 45. 2006)*

Karena itu usulan diskriminasi pada payung hukum yang merugikan itu, segera dirubah dengan payung hukum perkawinan yang sesuai perkembangan demokrasi harus mendapat respon, sebab HAM (Hak Azasi Manusia) tak bisa tegak dengan system kelembagaan yang tidak memberi keadilan pada pelaku yang harus dibawa ke pengadilan. Sementara dalam pendidikan, angka putus sekolah serta buta huruf yang sangat tinggi dialami kaum perempuan daripada angka putus sekolah yang dialami laki-laki juga, karena kuatnya konstruksi kultur patriarki di masyarakat. *Dus*, kemiskinan, diskriminasi dan kekerasan masih menjadi lingkaran mata rantai terpuruknya perempuan di Indonesia masih perlu keseriusan perjuangan yang ekstra dari kita semua. Hal ini harus kita lakukan bila kita ingin menjadi bangsa yang kuat dan kokoh dengan pilar-pilar perempuan yang kokoh dan kuat pula. Karena itu kemiskinan, diskriminasi, kekerasan dan hal-hal lain yang menjadi musuh utama demokrasi, menjadi prioritas penyelesaian masalah bangsa, menuju pembangunan yang berkeadilan dan sejahtera. Amin.****